

PERAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DI PT. BPRS HAJI MISKIN

Andini Amalia Putri SW¹, Iwan Setiawan²

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia^{1,2}

Email: andiniamaliaputrisw214@gmail.com¹, iwansetiawan@uinsgd.ac.id²

Keywords

Sharia Accounting, Transparency, Accountability, PT. BPRS Haji Miskin

Akuntansi Syariah, Transparansi, Akuntabilitas, PT. BPRS Haji Miskin

Abstract

This study explores the role of sharia accounting in enhancing transparency and accountability at PT. BPRS Haji Miskin. Employing a descriptive qualitative approach, primary data were collected through interviews, observation, and documentation involving managers and accounting staff. The findings show that the implementation of the Statement of Financial Accounting Standards for Sharia (PSAK Syariah) and guidelines from the National Sharia Council (DSN-MUI) in the process of recording and reporting sharia-based financing supports transparent and accountable financial administration. However, there are notable challenges, such as limited human resources with in-depth understanding of sharia accounting and the difficulties of integrating information technology systems. Efforts to improve transparency and accountability are carried out through intensive training, collaboration with regulators, and the digitization of accounting systems. The results of this research are expected to contribute to the development of better and more sustainable sharia financial governance practices in Indonesia's sharia banking sector.

Penelitian ini membahas peran akuntansi syariah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di PT. BPRS Haji Miskin. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari pihak manajemen dan staf akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah dan pedoman Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam pencatatan dan pelaporan pembiayaan syariah mampu menciptakan proses administrasi dan pelaporan yang transparan serta akuntabel. Namun, pelaksanaan akuntansi syariah menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami sistem secara mendalam serta tantangan integrasi teknologi informasi. Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dilakukan melalui pelatihan intensif, kolaborasi dengan regulator, serta implementasi teknologi digital dalam sistem akuntansi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik tata kelola keuangan syariah yang lebih baik dan berkelanjutan di lingkungan perbankan syariah Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menekankan keadilan, transparansi, serta akuntabilitas dalam tiap kegiatan keuangannya. PT. BPRS Haji Miskin sebagai salah satu BPRS di Indonesia mempunyai kedudukan strategis dalam sediakan layanan pembiayaan serta tabungan yang cocok dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, pelaksanaan akuntansi syariah menjadi sangat penting guna memastikan bahwa segala transaksi serta pelaporan keuangan dilakukan secara transparan serta akuntabel, sehingga bisa tingkatkan keyakinan nasabah serta pemangku kepentingan yang lain.¹

Transparansi serta akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam akuntansi syariah yang berkontribusi pada keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Transparansi mengacu pada keterbukaan data keuangan yang bisa diakses, dimengerti, serta dipercaya oleh seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk nasabah, regulator, serta warga umum. Akuntabilitas memastikan bahwa pengelolaan dana serta penerapan pembiayaan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip syariah serta standar akuntansi yang berlaku.² Dengan demikian, akuntansi syariah tidak cuma berperan selaku alat pencatatan, namun juga selaku instrumen pengawasan yang melindungi integritas serta keadilan dalam kegiatan perbankan syariah.

Pelaksanaan standar akuntansi syariah semacam PSAK Syariah serta pedoman dari Dewan Syariah Nasional (DSN- MUI) jadi kerangka kerja utama dalam menyusun laporan keuangan PT. BPRS Haji Miskin. Standar ini mengendalikan bagaimana produk pembiayaan syariah seperti murabahah, musyarakah, serta mudharabah harus dicatat, diukur, serta diungkapkan dalam laporan keuangan secara transparan serta akuntabel.³ Akan tetapi, dalam praktiknya, BPRS mengalami bermacam tantangan, seperti keterbatasan sumber energi manusia yang menguasai akuntansi syariah secara mendalam serta hambatan dalam pengoptimalan sistem data keuangan.

¹ Djazuli, & Januari. (2025). Analisis Peran Akuntansi Syariah Untuk Transparansi Dan Keberlanjutan Ekonomi di BMT Mitra Khazanah Palembang. *Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah STEBIS IGM*, 1(2).

² Sari, N., & Rahman, F. (2024). Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Mudharabah dan Musyarakah: Fondasi Kuat Untuk Kerja Sama Yang Berkelanjutan. *Jurnal Akuntansi Syariah*.

³ Nasution, R. (2024). Prinsip Dasar Akuntansi Syariah: Landasan Integritas dan Transparansi dalam Keuangan Berbasis Nilai Islam. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.

Penelitian ini bertujuan guna mengkaji kedudukan akuntansi syariah dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas di PT. BPRS Haji Miskin, sekaligus mengidentifikasi hambatan serta pemecahan yang bisa diterapkan untuk menguatkan tata kelola keuangan syariah. Dengan meningkatnya pemahaman warga hendak berartinya keuangan syariah yang transparan serta akuntabel, kedudukan akuntansi syariah jadi terus menjadi vital dalam melindungi keyakinan serta menunjang perkembangan lembaga keuangan syariah secara berkepanjangan.⁴

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mendapatkan uraian yang mendalam serta komprehensif mengenai pelaksanaan akuntansi syariah dalam pengelolaan pembiayaan di PT. BPRS Haji Miskin. Pendekatan kualitatif dipilih karena riset ini berfokus pada proses, praktik, dan hambatan yang dialami dalam penerapan akuntansi pembiayaan syariah secara kontekstual dan detail. Dengan pendekatan ini, peneliti bisa menggali data yang bersifat subjektif serta kompleks yang tidak mudah diukur secara kuantitatif, sehingga menciptakan gambaran yang utuh mengenai fenomena yang diteliti.

Sumber informasi dalam penelitian ini terdiri dari data primer serta data sekunder. Data primer diperoleh lewat wawancara mendalam dengan sebagian informan kunci, yakni pihak manajemen, staf akuntansi, serta bagian pembiayaan di PT. BPRS Haji Miskin. Wawancara ini bertujuan guna mengumpulkan data terkait prosedur pencatatan, pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan pembiayaan syariah sesuai dengan standar PSAK 102 serta standar akuntansi syariah yang lain. Tidak hanya itu, peneliti juga melaksanakan observasi langsung terhadap proses administrasi serta pencatatan pembiayaan guna memperoleh informasi lapangan yang lebih akurat serta kontekstual. Sebaliknya data sekunder diperoleh dari dokumen internal bank semacam laporan keuangan, manual prosedur akuntansi, dan regulasi serta pedoman akuntansi syariah yang berlaku. Riset pustaka juga dilakukan dengan mengkaji literatur, harian ilmiah, serta buku yang mangulas akuntansi syariah serta pembiayaan berbasis akad syariah sebagai landasan teori serta pembandingan praktik di lapangan.

⁴ Putri, A., & Sari, M. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaporan Keuangan Syariah di Lembaga Keuangan Islam. *JESYA: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, 8(1), 307-317.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara semi- terstruktur, observasi partisipatif, serta dokumentasi. Wawancara semi- terstruktur dilakukan dengan membagikan pertanyaan terbuka kepada informan kunci sehingga memungkinkan peneliti mendapatkan jawaban yang mendalam serta kontekstual. Observasi partisipatif dilakukan dengan metode melihat langsung proses pencatatan serta pelaporan pembiayaan syariah dan pengendalian internal yang diterapkan di PT. BPRS Haji Miskin. Dokumentasi berupa pengumpulan serta analisis dokumen formal semacam laporan keuangan, catatan akuntansi, serta kebijakan internal juga jadi sumber informasi berarti dalam penelitian ini.

Setelah informasi terkumpul, peneliti melaksanakan analisis informasi secara kualitatif dengan tahapan pengorganisasian informasi, reduksi informasi, penyajian informasi, serta penarikan kesimpulan. Analisis ini dicoba dengan menyamakan penerapan akuntansi pembiayaan yang diterapkan di PT. BPRS Haji Miskin dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah serta standar akuntansi syariah yang lain. Tidak hanya itu, analisis juga mencakup identifikasi hambatan serta aspek pendukung dalam pelaksanaan akuntansi syariah, sehingga bisa membagikan cerminan yang komprehensif mengenai keadaan nyata di lapangan.

Guna melindungi validitas informasi, penelitian ini memakai metode triangulasi sumber dengan menyamakan data yang diperoleh dari bermacam sumber, seperti wawancara, observasi, serta dokumentasi. Tidak hanya itu, dilakukan member check dengan mengonfirmasi hasil penemuan kepada narasumber buat membenarkan keakuratan serta kesesuaian interpretasi informasi. Dengan demikian, hasil riset diharapkan bisa membagikan cerminan yang valid serta bisa dipercaya mengenai peran akuntansi syariah dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas di PT. BPRS Haji Miskin.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Pembiayaan

Implementasi akuntansi syariah dalam pengelolaan pembiayaan di PT. BPRS Haji Miskin dilakukan secara terstruktur serta sistematis guna memastikan segala kegiatan keuangan berjalan transparan, akuntabel, serta cocok dengan prinsip syariah. Setiap transaksi pembiayaan seperti murabahah, musyarakah, serta mudharabah dicatat berlandaskan standar akuntansi syariah yang berlaku, khususnya Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah serta pedoman dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Proses pencatatan diawali dari dokumentasi akad, verifikasi fakta transaksi, sampai pencatatan pembayaran angsuran nasabah, yang seluruhnya didukung dokumen lengkap semacam perjanjian akad, bukti penyerahan benda ataupun dana, dan catatan pelunasan. Perihal ini bertujuan supaya segala kegiatan bisa dipertanggungjawabkan secara administratif dan syariah.⁵

Transparansi pelaporan keuangan jadi pilar utama dalam implementasi akuntansi syariah. Laporan keuangan disusun secara teratur dan terbuka, memuat data perinci mengenai posisi keuangan, kinerja pembiayaan, dan pemakaian dana pihak ketiga. Penyusunan laporan ini mengacu pada standar akuntansi syariah serta dapat diakses oleh pihak internal ataupun eksternal, termasuk nasabah serta regulator, guna membangun keyakinan serta meminimalisir resiko manipulasi informasi. Tiap pergantian ataupun penyesuaian dalam laporan keuangan didasarkan pada hasil audit internal serta eksternal, sehingga resiko kesalahan ataupun penyimpangan bisa diminimalisir.⁶

Akuntabilitas diwujudkan lewat mekanisme pengawasan internal yang ketat, mulai dari proses pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan, sampai penyaluran serta pelaporan pemakaian dana. Pengawasan tidak cuma dicoba oleh manajemen internal, namun juga mengaitkan Dewan Pengawas Syariah(DPS) guna membenarkan segala kegiatan sesuai prinsip syariah serta standar akuntansi yang berlaku. Audit berkala serta penilaian kinerja keuangan menjadi bagian berarti dalam melindungi akuntabilitas, sehingga pengelolaan dana nasabah bisa dipertanggungjawabkan secara transparan dan profesional.

Akan tetapi, dalam penerapannya, implementasi akuntansi syariah masih mengalami sebagian hambatan, semacam keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai akuntansi syariah secara mendalam serta keterbatasan sistem data keuangan yang terintegrasi. Guna menanggulangi perihal ini, PT. BPRS Haji Miskin aktif melaksanakan pelatihan, workshop, serta pengembangan sistem data keuangan yang menunjang proses pencatatan serta pelaporan yang lebih efektif dan akurat. Kerja sama

⁵ Rahayu, T., & Prasetyo. (2025). Analisis strategi pemasaran bank syariah Indonesia dalam meningkatkan pangsa pasar melalui pemanfaatan teknologi informasi. *Jurnal Anggaran*, 3(2), 112-128.

⁶ Wardiyah, M. L. (2023). *Pengantar perbankan syariah*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

dengan lembaga pembelajaran serta regulator juga dicoba guna menguatkan uraian serta pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tiap kegiatan keuangan bank.

Transparansi dalam Laporan Keuangan

Transparansi dalam laporan keuangan ialah salah satu aspek fundamental yang sangat berarti untuk keberhasilan serta kredibilitas perbankan syariah, termasuk PT. BPRS Haji Miskin. Transparansi ini tidak hanya berperan selaku alat guna memenuhi kewajiban pelaporan kepada regulator serta pemangku kepentingan, namun juga selaku sarana membangun keyakinan nasabah, investor, serta warga luas terhadap integritas serta akuntabilitas institusi keuangan syariah. Dalam konteks perbankan syariah, transparansi laporan keuangan wajib mencerminkan kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip syariah, sehingga segala kegiatan keuangan yang dilaporkan tidak cuma akurat serta lengkap, namun juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) jadi landasan utama dalam penataan laporan keuangan yang transparan di bank syariah. PSAK Syariah mengendalikan bagaimana transaksi keuangan wajib diakui, diukur, serta diungkapkan, dengan mencermati ciri khusus produk serta jasa syariah semacam akad murabahah, musyarakah, mudharabah, serta ijarah. Dengan mengikuti PSAK Syariah, bank syariah bisa menyajikan laporan keuangan yang tidak cuma memenuhi standar akuntansi nasional namun juga mengakomodasi aspek syariah yang membedakan produk serta layanan mereka dari perbankan konvensional. Perihal ini meliputi pengungkapan yang jelas mengenai pembagian hasil, biaya-biaya yang terpaut dengan akad syariah, dan risiko-risiko yang menempel pada transaksi syariah.

Transparansi laporan keuangan juga mencakup pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian transaksi bersumber pada tipe akad, dan informasi terkait pengelolaan dana khusus seperti dana zakat, infaq, serta sedekah yang dikelola oleh bank. Informasi ini sangat berarti guna membenarkan jika dana yang dikumpulkan serta disalurkan betul-betul cocok dengan tujuan syariah serta bisa dipertanggungjawabkan secara moral serta hukum. Tidak hanya itu, keterbukaan data ini menolong para pemangku kepentingan dalam melaksanakan penilaian kinerja bank, pengambilan keputusan investasi, dan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Dari sisi regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tegas mengendalikan kewajiban transparansi serta publikasi laporan keuangan untuk bank umum syariah serta unit

usaha syariah. Regulasi tersebut bertujuan guna melindungi keterbukaan informasi, melindungi hak-hak konsumen, dan menaikkan stabilitas serta keyakinan pasar. Bank syariah diharuskan untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala serta terbuka, baik kepada regulator ataupun kepada publik lewat media yang gampang diakses. Perihal ini tidak hanya menaikkan akuntabilitas bank, namun juga menguatkan posisi bank syariah dalam persaingan industri keuangan nasional.

Tidak hanya aspek eksternal, transparansi laporan keuangan juga mempunyai ukuran internal yang sangat berarti, yakni selaku alat kontrol serta penilaian manajemen. Dengan laporan keuangan yang transparan serta akurat, manajemen bisa memantau kinerja keuangan secara real time, mengenali kemampuan resiko, dan mengambil keputusan strategis yang pas buat menaikkan efisiensi serta daya guna operasional bank. Transparansi ini juga menunjang pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas membenarkan segala kegiatan bank cocok dengan prinsip-prinsip syariah serta standar akuntansi yang berlaku.

Secara spiritual, transparansi dalam laporan keuangan juga mencerminkan tanggung jawab moral serta amanah seorang pengelola keuangan syariah, yang tidak hanya wajib mempertanggungjawabkan secara duniawi kepada nasabah serta regulator, namun juga secara ukhrawi kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, bank syariah wajib berkomitmen untuk senantiasa melindungi integritas serta keterbukaan dalam tiap aspek pelaporan keuangan selaku bentuk nyata dari prinsip keadilan serta kejujuran dalam Islam. Dengan demikian, transparansi dalam laporan keuangan bank syariah bukan cuma semata-mata kewajiban administratif, melainkan juga fondasi utama buat membangun keyakinan, menaikkan akuntabilitas, serta menunjang perkembangan dan keberlanjutan industri perbankan syariah di Indonesia.

Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana pada lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah seperti PT. BPRS Haji Miskin, mempunyai dimensi yang lebih luas serta mendalam dibanding dengan akuntabilitas pada lembaga keuangan konvensional. Secara fundamental, akuntabilitas ini tidak hanya mencakup pertanggungjawaban kepada pemegang saham serta kreditor, namun juga mempunyai dimensi vertikal kepada Allah SWT selaku bentuk amanah atas pengelolaan dana yang dipercayakan. Tidak hanya itu, ada dimensi horizontal yang meliputi tanggung jawab kepada deposan, investor,

regulator, serta warga umum selaku pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, lembaga keuangan syariah harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang aplikasi riba, gharar (ketidakpastian), serta maisir (judi), dan wajib berkontribusi pada kesejahteraan sosial serta ekonomi warga secara adil dan transparan.⁷

Dalam praktiknya, akuntabilitas diwujudkan lewat mekanisme pengawasan internal yang ketat serta sistem pelaporan yang transparan. Lembaga keuangan syariah wajib menyusun laporan pemakaian dana secara rinci, khususnya dana sosial semacam zakat, infaq, sedekah, serta wakaf, yang jadi bagian dari guna sosial bank. Laporan tersebut wajib mencakup sumber dana, pemakaian, dan mekanisme penyaluran yang jelas serta bisa dipertanggungjawabkan. Pengungkapan ini sangat berarti guna membangun keyakinan warga terhadap peran sosial lembaga keuangan syariah serta membenarkan jika dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan syariah.⁸

Tidak hanya itu, peningkatan akuntabilitas membutuhkan kesadaran yang kuat dari manajemen, dorongan regulasi yang mencukupi, dan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan dalam mengantarkan harapan serta kebutuhan data mereka. Pengelolaan dana yang akuntabel pula didukung oleh audit internal serta eksternal yang teratur, dan keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang membenarkan segala kegiatan keuangan mematuhi prinsip syariah serta standar akuntansi yang berlaku.⁹

Seiring dengan pertumbuhan teknologi, lembaga keuangan syariah mulai mengadopsi sistem data keuangan berbasis digital serta teknologi blockchain guna menaikkan efisiensi, transparansi, serta keamanan dalam pengelolaan dana. Pemakaian teknologi ini membolehkan pelacakan transaksi secara real time serta pengelolaan informasi yang lebih akurat, sehingga menguatkan akuntabilitas serta memesatkan proses pelaporan kepada pemangku kepentingan.¹⁰ Akan tetapi, tantangan masih ada, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai akuntabilitas syariah secara mendalam serta alterasi standar akuntansi syariah di bermacam negeri. Oleh sebab itu, pengembangan kapasitas SDM serta harmonisasi standar akuntansi syariah jadi aspek kunci guna menunjang keberlanjutan serta kredibilitas industri

⁷ Shalhoob, M. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Keuangan Syariah. *Jurnal Makesya*, 5(1).

⁸ Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports. *"Journal of Business Ethics"*, 76(1), 97-116.

⁹ Fitriani, F., Zulkifli, Z., & Masyhuri, M. (2025). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Salampe Dalam Wujud Pembangunan Tinjauan Dari Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 5(1), 185-192.

¹⁰ Salsabila, P. A., & Azwari, P. C. (2025). Peran Akuntansi Syariah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen dan Ekonomi*, 1(4), 907-921.

keuangan syariah secara global.¹¹ Dengan demikian, akuntabilitas dalam pengelolaan dana pada lembaga keuangan syariah merupakan fondasi utama yang tidak cuma melindungi kepatuhan terhadap prinsip syariah, namun juga menaikkan keyakinan warga serta menunjang perkembangan industri keuangan syariah secara berkepanjangan.

Hambatan dalam Penerapan Akuntansi Syariah

Implementasi akuntansi syariah di lembaga keuangan syariah seperti PT. BPRS Haji Miskin mengalami bermacam hambatan yang kompleks serta multidimensional. Salah satu hambatan utama yakni keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip akuntansi syariah. Banyak praktisi akuntansi serta manajemen yang belum mempunyai latar belakang pembelajaran serta pelatihan spesial dalam akuntansi berbasis syariah, sehingga pelaksanaan standar akuntansi syariah kerap kali hanya bersifat formalitas tanpa substansi yang mendalam. Keadaan ini menimbulkan kesenjangan antara teori serta aplikasi di lapangan, dan membatasi konsistensi penerapan akuntansi syariah secara menyeluruh.¹²

Hambatan selanjutnya merupakan kurangnya standar akuntansi syariah yang seragam serta komprehensif. Walaupun sudah diterbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta pedoman dari Dewan Syariah Nasional (DSN- MUI), pelaksanaannya belum menyeluruh di segala lembaga keuangan syariah. Perbedaan interpretasi serta pelaksanaan standar ini menimbulkan inkonsistensi dalam penyajian laporan keuangan yang bisa memunculkan kebimbangan untuk pemangku kepentingan serta menurunkan kredibilitas laporan tersebut.¹³

Tidak hanya itu, tantangan teknologi serta digitalisasi juga jadi hambatan signifikan. Integrasi sistem akuntansi syariah dengan teknologi data modern semacam digital banking, blockchain, serta aplikasi berbasis syariah membutuhkan investasi yang besar serta infrastruktur yang mencukupi. Banyak lembaga keuangan syariah mengalami keterbatasan dalam mengadopsi teknologi ini, sehingga proses pencatatan serta

¹¹ Mawardi, M. (2020). Tantangan dan Peluang Akuntabilitas Syariah dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 45-60.

¹² Sari, A., & Putra, F. (2025). Implementasi Akuntansi Syariah: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 2(2), 228-239.

¹³ Rahman, M., & Hidayat, R. (2024). Tantangan Standar Akuntansi Syariah di Indonesia. *JIC Nusantara*, 1(6), 45-60.

pelaporan keuangan belum maksimal serta kurang responsif terhadap kebutuhan pasar yang dinamis.¹⁴

Hambatan lain yang tidak kalah berarti merupakan kompleksitas pemisahan dana syariah serta dana operasional, semacam dana tabarru' dalam asuransi syariah, yang wajib dilindungi supaya tidak tercampur dengan dana konvensional. Pengelolaan dana yang tidak terpisah secara jelas bisa memunculkan resiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah serta mengurangi keyakinan nasabah.

Guna menanggulangi hambatan- hambatan tersebut, dibutuhkan upaya kolaboratif dari bermacam pihak, termasuk regulator, lembaga pembelajaran, serta pelakon industri. Pemecahan yang diusulkan meliputi harmonisasi standar akuntansi syariah secara nasional serta internasional, peningkatan kapasitas SDM lewat pelatihan serta sertifikasi khusus, investasi dalam teknologi informasi yang menunjang akuntansi syariah, dan transformasi paradigma dari sistem konvensional ke sistem berbasis syariah. Pendekatan ini diharapkan bisa meningkatkan efektivitas, konsistensi, serta kredibilitas penerapan akuntansi syariah di Indonesia.

Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Upaya peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan syariah, khususnya di bank syariah seperti PT. BPRS Haji Miskin, membutuhkan pendekatan yang komprehensif serta berkepanjangan. Salah satu langkah utama yaitu penguatan pelatihan serta pembelajaran akuntansi syariah untuk auditor, staf akuntansi, serta manajemen bank. Dengan peningkatan kapasitas sumber energi manusia yang menguasai prinsip- prinsip syariah serta standar akuntansi syariah (PSAK Syariah), proses pencatatan, pelaporan, serta pengawasan keuangan dapat dilakukan dengan lebih akurat serta sesuai regulasi.

Selanjutnya, kolaborasi yang erat antara regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta lembaga perbankan syariah sangat berarti guna memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi serta prinsip syariah. Pengawasan yang tidak berubah- ubah serta terintegrasi bisa menghindari penyimpangan dan meningkatkan keyakinan warga terhadap bank syariah. Regulasi

¹⁴ Aditiya, W. F., Qolbi, S. W., et al. (2024). Tantangan dan Solusi Penerapan Akuntansi Syariah dalam Bisnis. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Perbankan*, 1(4), 21-29.

yang jelas serta sokongan teknis dari regulator pula jadi pendorong utama dalam melindungi transparansi serta akuntabilitas.¹⁵

Tidak hanya itu, penerapan teknologi data serta digitalisasi sistem akuntansi menjadi aspek kunci dalam menaikkan efisiensi serta transparansi pelaporan keuangan. Pemakaian teknologi semacam blockchain serta big informasi bisa membantu menghasilkan sistem pelaporan yang real- time, nyaman, serta gampang diaudit. Perihal ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengakses data keuangan secara transparan serta cepat, sekaligus meminimalisir resiko manipulasi data.

Upaya lain yang tidak kalah berarti merupakan harmonisasi standar akuntansi syariah secara nasional serta internasional. Variasi standar serta interpretasi yang berbeda- beda selama ini jadi salah satu hambatan dalam pencapaian transparansi yang maksimal. Dengan harmonisasi standar, laporan keuangan bank syariah bisa jadi lebih konsisten, komparabel, serta bisa dipercaya oleh bermacam pihak, baik di tingkat dalam negeri ataupun global.

Terakhir, pengembangan budaya organisasi yang menempatkan nilai kejujuran, keterbukaan, serta tanggung jawab sosial selaku bagian dari tata kelola industri sangat dibutuhkan. Perihal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan serta amanah dalam pengelolaan keuangan. Budaya transparansi serta akuntabilitas ini hendak mendesak segala elemen organisasi guna melaksanakan tugasnya secara handal serta etis, sehingga menguatkan reputasi serta keberlanjutan bank syariah.¹⁶

Dengan demikian, peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan syariah bukan cuma soal kepatuhan administratif, namun juga merupakan upaya strategis guna menguatkan keyakinan warga, meningkatkan mutu layanan, serta menunjang perkembangan industri perbankan syariah secara berkepanjangan.

4. KESIMPULAN

Upaya peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan syariah di PT. BPRS Haji Miskin dilakukan secara berkepanjangan lewat bermacam strategi yang terintegrasi. Salah satu upaya utama merupakan menguatkan pelatihan serta pembelajaran akuntansi syariah untuk auditor, staf akuntansi, dan manajemen. Dengan uraian yang mendalam tentang prinsip- prinsip syariah serta standar akuntansi

¹⁵ Raju, D. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaporan Keuangan Syariah. *Jurnal Makesya*, 5(1).

¹⁶ Syukri, M. (2023). Transparansi dalam Akuntansi Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 2(1).

syariah (PSAK Syariah), proses pencatatan, pelaporan, serta pengawasan keuangan bisa berjalan lebih akurat serta cocok dengan regulasi yang berlaku.

Tidak hanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kolaborasi erat antara regulator semacam Otoritas Jasa Keuangan(OJK), Dewan Pengawas Syariah(DPS), serta lembaga perbankan syariah juga sangat berarti. Pengawasan yang terintegrasi serta konsisten dari bermacam pihak ini sanggup menghindari terbentuknya penyimpangan dan tingkatkan keyakinan warga terhadap institusi perbankan syariah. Regulasi yang jelas serta sokongan teknis dari regulator jadi pendorong utama dalam melindungi transparansi serta akuntabilitas.

Teknologi informasi serta digitalisasi sistem akuntansi juga jadi kunci dalam meningkatkan efisiensi serta transparansi pelaporan keuangan. Pemakaian teknologi semacam blockchain serta big informasi memungkinkan terciptanya sistem pelaporan yang real- time, nyaman, serta gampang diaudit. Dengan demikian, pemangku kepentingan bisa mengakses data keuangan secara transparan serta cepat, dan resiko manipulasi informasi bisa diminimalisir.

Upaya berikutnya merupakan harmonisasi standar akuntansi syariah secara nasional serta internasional. Selama ini, variasi standar serta interpretasi yang berbeda-beda jadi salah satu hambatan dalam pencapaian transparansi maksimal. Dengan standar yang seragam, laporan keuangan bank syariah bisa jadi lebih konsisten, komparabel, serta terpercaya di tingkat dalam negeri ataupun global.

Tidak hanya aspek teknis serta regulasi, pengembangan budaya organisasi yang menekankan nilai kejujuran, keterbukaan, serta tanggung jawab sosial juga sangat dibutuhkan. Budaya transparansi serta akuntabilitas ini akan mendesak segala elemen organisasi untuk melaksanakan tugas secara handal serta etis, sejalan dengan prinsip keadilan serta amanah dalam syariah. Dengan demikian, kenaikan transparansi serta akuntabilitas bukan cuma soal kepatuhan administratif, namun juga merupakan strategi berarti guna menguatkan keyakinan warga, meningkatkan mutu layanan, serta menunjang perkembangan industri perbankan syariah secara berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Aditiya, W. F., Qolbi, S. W., et al. (2024). Tantangan dan Solusi Penerapan Akuntansi Syariah dalam Bisnis. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Perbankan*, 1(4), 21-29. Diakses dari

- <https://ejournal.areai.or.id/index.php/JBEP/article/download/622/1002/3444>
Djazuli, & Januari. (2025). Analisis Peran Akuntansi Syariah Untuk Transparansi Dan Keberlanjutan Ekonomi di BMT Mitra Khazanah Palembang. *Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah STEBIS IGM*, 1(2).
- Fitriani, F., Zulkifli, Z., & Masyhuri, M. (2025). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Salampe Dalam Wujud Pembangunan Tinjauan Dari Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 5(1), 185-192. .
<https://doi.org/10.36908/jimpa.v5i1.523>
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports. *“Journal of Business Ethics”*, 76(1), 97-116.
- Mawardi, M. (2020). Tantangan dan Peluang Akuntabilitas Syariah dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 45-60.
- Nasution, R. (2024). Prinsip Dasar Akuntansi Syariah: Landasan Integritas dan Transparansi dalam Keuangan Berbasis Nilai Islam. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Putri, A., & Sari, M. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaporan Keuangan Syariah di Lembaga Keuangan Islam. *JESYA: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, 8(1), 307-317.
- Rahayu, T., & Prasetyo. (2025). Analisis strategi pemasaran bank syariah Indonesia dalam meningkatkan pangsa pasar melalui pemanfaatan teknologi informasi. *Jurnal Anggaran*, 3(2), 112-128.
- Rahman, M., & Hidayat, R. (2024). Tantangan Standar Akuntansi Syariah di Indonesia. *JIC Nusantara*, 1(6), 45-60. Diakses dari
<https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/download/1589/1736/8158>
- Raju, D. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaporan Keuangan Syariah. *Jurnal Makesya*, 5(1).
- Salsabila, P. A., & Azwari, P. C. (2025). Peran Akuntansi Syariah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen dan Ekonomi*, 1(4), 907-921.
<https://doi.org/10.71417/j-sime.v1i4.454>
- Sari, A., & Putra, F. (2025). Implementasi Akuntansi Syariah: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 2(2), 228-239. Diakses dari
<https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIEAP/article/download/1101/1341/56>

- Sari, N., & Rahman, F. (2024). Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Mudharabah dan Musyarakah: Fondasi Kuat Untuk Kerja Sama Yang Berkelanjutan. *Jurnal Akuntansi Syariah*.
- Shalhoob, M. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Keuangan Syariah. *Jurnal Makesya*, 5(1). <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/makesya/article/download/3030/1514/10885>
- Syukri, M. (2023). Transparansi dalam Akuntansi Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 2(1).
- Wardiyah, M. L. (2023). *Pengantar perbankan syariah*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.